

IMPLEMENTASI PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

Dyah Kusumaning Tiyas
NPP. 29.0790

Asal Pendaftaran Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: dyahtiyas@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The pandemic period in Indonesia is still a serious problem. The spread of this virus fairly fast. Human contact is the main cause of cases that occur in Indonesia. The spread of COVID-19 in Indonesia, especially in the land of Java itself, is very difficult to control considering that the Javanese community is a community group that prioritizes togetherness.*

Purpose: *the purpose of this research is the implementation of the application of discipline and law enforcement of health protocol as an effort to prevent and control COVID-19 in Purworejo Regency, knowing various kinds of inhibiting factors, as well as efforts to overcome these inhibiting factors. Edwards III's Implementation Theory is the theory used in this research based on four variables, namely (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, and (4) Bureaucratic Structure.* **Method:** *which is used in analyzing the data is by using a qualitative descriptive analysis technique with an inductive approach. Data collection uses three research tools, namely, interview, observation, and analysis.* **Result:** *The analysis result in (1) lack of public awareness that causes the health protocol implementation to be less than optimal, (2) lack of personnel in the field, (3) inadequate facilities to support the activities of the health protocol implementation and, (4) no incentives for the employees on duty during the health protocol implementation.* **Conclusion:** *based on this analysis, there is a need to socialize and educate the community, to submit a procurement budget, to carry out a judicial operation with a joint team and to hold partnership with related agencies so that the shortage of facilities and personnel can be solved and the tasks can be best implemented.*

Keywords: *implementation, Health Protocol, COVID-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masa pandemi di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius. Penyebaran virus ini terbilang sangat cepat, kontak antar manusia adalah penyebab utama dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Persebaran COVID-19 di Indonesia khususnya pada wilayah tanah Jawa sendiri sangat susah untuk dikendalikan mengingat masyarakat Jawa merupakan kelompok masyarakat yang mengedepankan kebersamaan. **Tujuan:** Tujuan dalam penelitian ini adalah Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah adalah penelitian guna memperoleh gambaran umum mengenai Pengakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Purworejo, mengetahui berbagai macam faktor penghambat, juga upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Teori Implementasi Edward III menjadi teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan berdasar pada empat variable yakni (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. **Metode:** yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan teknis analisis diskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan tiga alat penelitian, yaitu; wawancara, Observasi, dan analisis. **Hasil/Temuan:** Analisis ini menghasilkan (1) kurangnya kesadaran masyarakat sehingga menyebabkan penerapan protokol kesehatan kurang maksimal, (2) kurangnya personil di lapangan (3) fasilitas yang belum memadai dalam menunjang kegiatan penertiban proses (4) tidak adanya insentif bagi pegawai yang bertugas selama penertiban protokol kesehatan. **Kesimpulan:** Berdasarkan hal tersebut diperlukannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mengajukan anggaran untuk pengadaan barang, melakukan operasi yustisi dengan tim gabungan serta menjalin Kerjasama dengan pihak lain sehingga keterbatasan dari segi fasilitas dan personil dapat terbantu sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih maksimal.

Kata kunci: Implementasi, Protokol Kesehatan, COVID-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius akibat dari adanya Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019*. Pandemi ini bermula dari virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2). Virus yang menyerang organ pernafasan yang kemudian dapat menimbulkan resiko pneumonia ringan, pneumonia berat, sampai menjadi pemicu kematian (Yuliana, 2020). Penyebaran virus dikatakan sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan karena dapat menular dengan atau tanpa transmitor. Apabila melalui transmitor adalah melalui kontak langsung dengan hewan atau orang yang terinfeksi sedangkan apabila tidak itu karena ketidaksengajaan menyentuh benda yang sudah terinfeksi oleh virus ini. Faktanya, virus mampu hidup dengan menempel di benda mati. Dan dapat menginfeksi bagi orang sehat yang tidak sengaja menyentuhnya (Yuliana, 2020).

Persebaran COVID-19 di Indonesia khususnya merupakan kelompok masyarakat yang mengedepankan kebersamaan banyaknya aktivitas dan mobilisasi mereka lakukan bersama. Hal inilah yang memicu adanya kerumunan dan mengakibatkan adanya peluang besar penyebaran Covid-19 di Jawa. Provinsi Jawa Tengah yang merupakan jantung budaya tercatat pada 29 Agustus 2021 menduduki peringkat ketiga dengan kasus sebanyak 468.178 terkonfirmasi Covid-19, dengan rincian 425.297 sembuh, 30.609 masih aktif dan 11.972 dinyatakan meninggal dunia (Tribun Jateng, 2021)

Kabupaten Purworejo adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan mempunyai luas wilayah 103.482 Km² dan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 717.716 jiwa (BPS Purworejo). Purworejo menduduki peringkat ke Sembilan dari 29 Kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menyumbang 3,6% dari seluruh kasus Covid-19 di Jawa Tengah, yang tingkat kesembuhan

mencapai 3,5% dan angka kematian mencapai 7,8%. Prosentasi angka yang kematian yang terbilang tinggi ini membuktikan bahwa persebaran Covid-19 di Kabupaten Purworejo perlu menjadi perhatian khusus demi menyelamatkan kehidupan masyarakat Purworejo. Adanya kasus yang fluktuatif ini menerangkan bahwa masih terdapat faktor yang kemudian menjadikan masyarakat terkena Covid-19, salah satunya adalah mereka yang belum mau mematuhi protokol kesehatan hal ini dibenarkan oleh Kepala Satuan Pol PP yang menerangkan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk mendukung proses penekanan angka Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan.

Melihat adanya kasus yang semakin bertambah disetiap harinya Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya penuh untuk mencegah dan mengendalikan persebaran Covid-19 salah satunya adalah dengan membuat sekaligus menetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Purworejo. Selain untuk menekan angka persebaran Covid-19 Peraturan ini disusun sebagai dasar hukum dalam menertibkan Protokol Kesehatan di masyarakat. Dalam melaksanakan peraturan tersebut Satpol PP merupakan pelaksana sekaligus instansi yang melakukan pengawasan terhadap Peraturan Bupati tersebut. penegakan protokol kesehatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satuan yang memiliki tugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan fungsi perlindungan kepada masyarakat lewat pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang diangkat terkait dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Adanya peraturan ini nampaknya belum dapat terlaksana dengan baik dilapangan dikarenakan ditemukan masih banyak kasus Covid-19 di Kabupaten Purworejo hingga menduduki peringkat Sembilan se-Provinsi Jawa Tengah dengan prosentase kesembuhan 3,5% dan prosentase kematian mencapai 7,8% , tidak hanya itu masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mematuhi protocol kesehatan selama melakukan aktivitas di luar rumah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Purworejo yaitu: kurangnya tenaga ahli dalam bidang penanganan Covid-19, kurangnya sarana dan prasarana penunjang penanganan Covid-19, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab satuan tugas Covid-19 dalam menangani Covid-19 masih belum maksimal, serta kurangnya kesadaran dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya yang digunakan memiliki topik berkaitan dan relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian Arthemevia Indhawati et.al (2021) dari Universitas Pembangunan Nasional yang berjudul “Implementasi Kebijakan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo” dalam rangka menghentikan penularan Covid-19 yang terus menyebar dari waktu ke waktu dilakukan penelitian pada pondok pesantren tersebut menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan model penerapan kebijakan Edward III dalam penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan harus disampaikan dengan baik secara

profesional dan menjalankan pelayanan publik supaya terjalin komunikasi yang baik. Kurangnya komunikasi yang baik mengakibatkan tidak terlaksananya dengan baik penerapan protocol Kesehatan untuk itu perlu dilakukan operasi masker dan operasi protocol Kesehatan secara berkala dan sesering mungkin.

Penelitian Meriwijaya dan Luth (2021) dari Universitas Selamat Sri yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan penanganan Covid-19 di Pondok Pesantren Modern Selamat Kcamatan Kendal, Jawa Tengah” berawal dari penemuan kasus penyebaran Covid-19 di Pondok pesantren modern Selamat yang kemudian dilakukan penelitian terkait dengan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada pondok pesantren tersebut dengan menggunakan metode penelitian adalah diskriptif kualitatif yang berpedoman pada konsep-konsep studi kepustakaan dan wawancara, penelitian ini kemudian menghasilkan upaya dalam menghentikan laju penyebaran Covid-19 melalui beberapa kegiatan yakni upaya dalam menemukan kasus dengan cara melakukan pengecekan Kesehatan kepada para santri dan civitas, menyediakan fasilitas Kesehatan guna penanganan korban dari anggota yang terpapar Covid-19 serta meminimalisir dampak pandemic dengan menutup akses menuju pondok pesantren..

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait dengan penerapan kebijakan dari Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 yang mana dari peraturan ini diharapkan pelaksanaan protocol Kesehatan di masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dalam membantu mengurangi dan mengendalikan penyebaran Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Purworejo., teori yang digunakan menggunakan teori Implementasi oleh Edward III dalam Agustino yang menyatakan bahwa dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan dapat digunakan 4 dimensi yang terpenuhi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Purworejo, mengetahui kendala yang muncul di lapangan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif yang bertujuan agar hasil penelitian dapat memberi gambaran secara sistematis dan akurat. Hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk laporan penelitian yang disusun dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, PPNS, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan masyarakat. Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data

primer dan sumber data sekunder. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi dari Edward III dalam Agustino. yang menyatakan bahwa Implementasi merupakan penerapan yang identik dengan suatu kebijakan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan menggunakan 4 dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya konfirmasi di tengah masyarakat menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, pasalnya setiap hari muncul variasi kasus yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Meski beberapa waktu lalu sempat terjadi penurunan kasus, kewaspadaan di masyarakat harus tetap digalakan karena kasus COVID-19 memiliki deteksi gejala awal yang cukup berbahaya utamanya untuk masyarakat yang memiliki penyakit bawaan yang serius, namun tidak semua orang mengetahui adanya penyakit bawaan tersebut dalam dirinya. Cepatnya persebaran virus ini mengakibatkan ketidakpastian pemerintah dan juga masyarakat untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Timbul kekacauan ekonomi sangat terasa karena masyarakat tidak mengimbangi diri dalam melaksanakan proteksi diri ditengah maraknya pandemi Covid-19.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo berperan penting untuk menegakan protokol Kesehatan khususnya untuk melakukan fungsi perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga diri dan orang lain supaya tetap aman dalam menjalankan kehidupan sehari hari dan terhindar dari virus corona. Tingkat keberhasilan merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 yang dapat diukur melalui variable model Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh George C. Edward III yang mana terdapat 4 (empat) variable sebagai dengan sebagai berikut;

Tabel I.

Variabel dan Indikator pada Teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III

No	Variabel	Indikator
1	Komunikasi	Transmisi
		Kejelasan
		Konsistensi
2	Sumberdaya	Staf
		Informasi
		Wewenang
		Fasilitas
3	Disposisi	Pengangkatan Birokrat
		Insentif
4	Struktur Birokrasi	SOP
		Fragmentasi

Sumber: George Edward III dalam Agustino (2008: 149-154)

3.1 Komunikasi

Menurut Kepala Satpol PP dan PK Kabupaten Purworejo, Hariyanto adanya penyampaian informasi terkait Protokol Kesehatan dilaksanakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain untuk pengetahuan dan juga memproteksi diri serta memberikan informasi valid yang dapat dipertanggung jawabkan. Sosialisasi yang dilakukan lebih menekankan pada edukasi masyarakat dengan cara yang humanis dengan mengandalkan sikap fleksibelitas yakni menyesuaikan terhadap tingkat pemahaman seorang terhadap suatu peraturan. Tidak bisa di samakan menangani pelanggar protokol kesehatan lansia dengan remaja untuk itu dibutuhkan sikap yang dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Pendekatan sosialisasi sendiri lebih dibebankan kepada tokoh agama maupun pemangku adat. Hal ini karena banyak dari masyarakat Purworejo yang lebih mudah mendengar saran dan anjuran dari tokoh adat dan agama yang ada di lingkungan mereka.

Tujuan memebrikan sosialisasi kepada tokoh agama agar mereka dan pengikutnya mau dan patuh untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengingat bahayanya Covid-19. Meski masih banyak tokoh agama yang menganggap remeh adanya virus ini yang akhirnya membuat mereka patuh bukan dari hati Nurani namun untuk menghindari sanksi sosial dari lingkungan mereka dan menghindari sanksi yang ada.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya sangat bereperan dalam adanya kebijakan. Aktor penegak yang memiliki sopan santun dan berwibawa akan menjadi pendorong dari kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan adanya kemampuan dalam memberi pemahaman kepada masyarakat sangat diunggulkan sebab akan mudah dimengerti oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya para aktor menggunakan pendekatan secara persuasive dan humanis sehingga masyarakat menadi lebih paham akan pentingnya menjaga diri mereka dari bahaya Covid-19.

Penerapan Protokol Kesehatan tentunya berangkat dari pemahaman mendalam terkait protokol kesehatan. Banyaknya informasi yang berkembang dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan, di kalangan masyarakat. Untuk itu diperlukan crosscheck informasi baik dari masyarakat ke aparat ataupun sebaliknya agar tidak menjadi isuue yang kemudian berkembang di masyarakat. Untuk mencegah hal hal initerjadi maka dibutuhkan adanya kewaspadaan agar pemerintah dalam menyampaikan informasi harus memahami betul apa yang menjadi penyampaian dan masyarakat dalam menerima informasi kemudian patuh dalam melaksanakan kebijakan yang telah disampaikan.

Jumlah personil yang turun dalam menangani kasus Covid-19 cukup banyak yakni mencapai 127 orang namun dalam hal ini semua satuan ikut bergantian dalam melaksanakan piket akibat dari keterbatasan personil. Untuk menutupi kekurangan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran kemudian mengadakan Operasi Yustisi yang dilaksanakan dengan tim gabungan yakni mengikutsertakan TNI, POLRI, BPBD juga melibatkan satgas terkecil yakni satgas Jogo Tonggo yang bertugas di tingkat dusun dalam memantau sekaligus pengingat agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih maksimal pelaksanaannya.

Tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kebijakan akan menjadi lebih jelas dan tegas jika diikuti oleh adanya sebuah kewenangan. Wewenang merupakan sebuah legitimasi yang bersifat formal dari para pelaksana kebijakan. Menurut Bapak Hariyono, Peraturan Bupati No 61 Tahun 2020 merupakan

landasan dari pelaksanaannya penertiban protokol kesehatan hal tersebut menjadi kekuatan hukum dan terjamin dengan jelas apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

Adanya kewenangan itu kemudian dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan penertiban protokol kesehatan yang sekarang lebih ditekankan pada sosialisasi dan edukasi bersifat humanis dan persuasive.

Penunjang yang juga berperan dalam terlaksananya suatu kebijakan adalah fasilitas. Tanpa adanya sarana prasarana yang cukup dan memadai proses dari pelaksanaan kebijakan sendiri cenderung akan terhambat dan tidak bisa berjalan secara maksimal. Menurut Bapak Agung Supriyanto selaku Kabid Tantribum menerangkan bahwa fasilitas yang dimiliki terbilang kurang. Pernah melakukan pengajuan untuk pengadaan namun hal tersebut tertunda akibat datangnya Covid-19 karena terjadi refocusing anggaran. Tidak hanya itu bangunan yang difungsikan terbilang masih belum memadai. Adanya kendaraan mobil dan motor sudah banyak mengalami kerusakan akibat dari pemakaian yang lama.

Pihak satpol pp dalam Rencana Kerja tahun ini berusaha untuk menganggarkan beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan dan juga melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan untuk menutupi kekurangan yang ada.

3.3 Disposisi

Disposisi merupakan dimensi yang membahas terkait dengan sikap pelaksana kebijakan. Pemahaman kewajiban menjadi tolak ukur penentu kebijakan. Terdapat dua indikator dalam dimensi ini yakni Pengangkatan Birokrasi dan Insentif . terjadi pengangkatan personil saat masa pandemi ini untuk menanggapi hal ini diharapkan pelaksanaan dilaksanakan dengan tepat agar mampu membentuk tim yang satu suara dan dapat bekerjasama dengan baik.

Diperlukannya tim pelaksana kebijakan yang kompak sangat diperlukan. Menurut Ibu Siti Napsiyah Pengangkatan Birokrasi bergantung pada BKD. Untuk memilih dan mengangkat birokrat baru, mereka musti memastikan kualifikasi, kompetensi dan juga syarat yang sudah memadai sehingga hasilnya akan memuaskan.

Pendorong dari kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh adanya insentif yang diberikan kepada pegawai yang bekerja lebih dalam hal ini melakukan penertiban protokol kesehatan. Namun menurut Ibu Siti Napsiyah insentif tidak terdapat dalam anggaran kerja sehingga para pegawai tidak dapat mendapatkan insentif untuk menjadi reward ataupun penyemangat dalam melaksanakan kerja yang memiliki risiko cukup besar ini. hanya terdapat dana untuk konsumsi selama pelaksanaan tugas.

3.4 Struktur Birokrasi

Dimensi Struktur Birokrasi Keterpaduan antara Lembaga ataupun badan berkaitan penuh dengan adanya pelaksanaan kebijakan terlebih dalam menangani permasalahan mengenai pelaksanaan protokol Kesehatan. Dalam menunjang kinerja agar lebih maksimal ada 2 (dua) macam karakteristik di dalamnya yakni terkait dengan Standar Operasional Prosedur dan juga Fragmentasi. Standar operasional prosedur sendiri merupakan pedoman dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan tagging jawab yang telah ditetapkan terlebih dalam melaksanakan penertiban protokol Kesehatan. Menurut Bapak Hariyono selaku Kasat Pol PP terkait dengan SOP Pol PP

menggunakan Perbup No. 61 dalam melaksanakan kegiatan penertiban disana terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi selama masa pandemi bagi individu maupun pelaku usaha. Bagi perorangan SOP yang diberlakukan adalah menerapkan 4M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sedangkan bagi pelaku usaha sendiri mereka berkewajiban dalam menerapkan protokol kesehatan dengan cara menyediakan fasilitas berupa *handsanitizier*, mewajibkan pegawai dan pelanggan untuk tetap menggunakan masker serta menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan

menurut Ibu Endang Muryani pemberlakuan SOP ini tentunya tidak hanya untuk masyarakat luar melainkan pada personil Pol PP sendiri. Karena mereka akan menjadi contoh di masyarakat. Kasus Covid-19 yang semakin menurun dan vaksinasi yang terus saja digencarkan pemerintah tidak mengurangi pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan protokol kesehatan. Terdapat sanksi bagi mereka yang melanggar berupa sanksi administrative baik dengan teguran lisan, tulisan, sanksi denda sosial, hingga pada pencabutan sementara izin usaha demi menjaga kesehatan masyarakat.

Sejauh ini pelaksanaan monitoring dan penerapan SOP telah berjalan dengan baik dimasyarakat dan pegawai Satpol PP. Penerapan SOP hingga saat ini masih diterapkan hanya lebih mengedepankan pada unsur sosialisasi dan edukasi yang lebih humanis kepada masyarakat yang masih belum menaati protokol Kesehatan. Hasil dari monitoring kemudian dijadikan bahan dalam evaluasi untuk kemudian di tindaklanjuti dalam pemecahan masalah agar di tengah pandemi yang makin menurun masyarakat tetap terjamin keselamatannya dari bahaya Covid-19.

Fragmentasi atau biasa disebut dengan pembagian kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberlangsungan birokrasi. Pembagian kerja tersebut yakni antara Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo, dalam melaksanakan penerapan protokol Kesehatan yang melibatkan dua bagian tersebut dengan Satpol PP sebagai pemonitor dalam menegakan protokol Kesehatan, sedangkan Pemadam Kebakaran ikut berperan dalam membantu menyemprotkan Desinfektan di sepanjang jalan yang umumnya ramai dikunjungi masyarakat dan juga beberapa titik dengan tingkat persebaran Covid-19 yang tinggi.

Tidak hanya itu terdapat peran beberapa instansi yang turut membantu dalam melaksankan penerapan protokol kesehatan seperti BPBD, TNI, POLRI, Dishub, Dinkes dan beberapa badan lainnya. Satpol PP dan damkar, TNI BPBD, dan BPBD berperan turun langsung di masyarakat dengan melakukan kegiatan dan sosialisasi dan edukasi rutin di masyarakat. Dinkes berperan dalam menyediakan fasilitas bagi para pasien Covid-19. Dishub yang mengontrol transportasi pribadi.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Purworejo telah terlaksana sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020, adanya dukungan dan kerjasama dengan beberapa pihak menjadikan kebijakan ini menjadi lebih cepat untuk disebarluaskan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga penyebaran Covid-19 di Kabupaten Purworejo dapat terkendali. Sama halnya dengan temuan Arthemia Indhawati et.al bahwasanya diadakannya Operasi Yustisi secara gabungan Bersama TNI, Polri, dan BPBD sangat efisien dan lebih efektif dalam mencapai tujuan dalam mengingatkan masyarakat menaati protokol Kesehatan. Perilaku serta sikap para penegak peraturan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan masyarakat mau patuh dalam menerapkan Protokol Kesehatan. Begitupun temuan Meriwijaya dan Luth, adanya persiapan dalam memfasilitasi

para pasien yang terpapar Covid-19 juga menjadi salah satu bentuk respon yang baik sehingga di lapangan masyarakat menjadi lebih kondusif dan dapat terkontrol.

Kebijakan Penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan dalam implementasinya juga masih terdapat beberapa kekurangan terkait dengan Fasilitas yang belum memadai, jumlah personil, insentif bagi pegawai, dan juga respon masyarakat yang ternyata belum sejalan dengan pemerintah dalam upaya memerangi Covid-19 Di Kabupaten Purworejo. Kebijakan terkait penerapan disiplin protokol kesehatan merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah dalam upaya memerangi dan mengatasi adanya wabah penyakit menular Covid-19 di Kabupaten Purworejo dan menjadi pedoman dalam melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah.

IV. KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan (1). Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan dengan baik hal ini di dukung dengan adanya pemenuhan indikator yang menjadi tolak ukur dalam implementasi penerapan protokol Kesehatan. Terdapat 3 dari 11 indikator yang belum dapat terlaksana dengan baik seperti staf, fasilitas dan juga insentif. (2) faktor yang menghambat a) Ketidakpercayaan sepenuhnya masyarakat terhadap adanya Covid-19 yang menghambat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. untuk itu diberikan sosialisasi dan edukasi guna meyakinkan kepada masyarakat agar paham dan sadar akan bahaya Covid-19 b). Sumber Daya yakni tenaga kerja yang masih kurang jumlahnya hal ini mengakibatkan kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. untuk itu dilakukan operasi bersama tim gabungan untuk menutup kekurangan personil. c) Fasilitas penunjang yang belum memadai hal tersebut akan menghambat kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan. belum maksimal mengajukan pengadaan barang guna memenuhi fasilitas dan pengadaan kerjasama kepada pihak lain. d) Insentif yang belum tersedia, hal ini dapat memicu semangat kerja bagi pegawai, mengingat risiko pekerjaannya yang besar. Diharapkan BKD segera memenuhi permintaan penambahan personil dan juga mengajukan anggaran insentif pegawai. Selain itu untuk menambah inovasi kegiatan pencegahan persebaran covid-19 seperti memberikan solusi untuk bertahan dimasa pandemi baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian yang mengacu pada teori Implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan Covid-19 di Kabupaten Purworejo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Purworejo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media
- Labolo, Muhadam. 2013. *Ilmu Pemerintahan Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muslich, M. & Maryaeni. (2009). *Bagaimana menulis skripsi*. PT Bumi Aksara.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development*. PUSAKA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Yusuf, A., Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Purworejo
- Akib, H. (2012). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana*
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. 1,*
- Pinasti, F. D. A. (N.D.). *34. Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan.*
- Siagian, T. H. (2020, June). *jurnal penyakit bawaan dapat meningkatkan risiko terkena covid— Penelusuran Google.*
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B.,

Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67.

Tandywijaya, E. (2020). “Mangan Ora Mangan, Sing Penting Kumpul” (Makan Tidak Makan Yang Penting Kumpul) Tinjauan Filosofis “Aku Dan Liyan” Dalam Gagasan Togetherness Para Filsuf Barat. *Jurnal Ilmu Budaya*, 8(2), 198–207.

Yuliana, Y. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192

Antara. (2020, July 21). *4 Tugas Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi dari Jokowi—Bisnis Tempo.co*.

Pane. (2020, January 29). *Virus Corona*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/virus-corona>

Transmisi-sars-cov-2—Implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi—Pernyataan-keilmuan.pdf.

Update Virus Corona Jawa Tengah Minggu 29 Agustus 2021. (n.d.). Tribunjateng.com. Retrieved September 22, 2021, from

Widyaningrum. (2020). *WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? – National Geographic*. Nationalgeographic.

